

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Praktik akuntansi sektor publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk pada entitas ekonomi di tingkat desa. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2025) menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas keberlanjutan di sektor publik merupakan agenda strategis nasional yang harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk pada badan usaha yang dibentuk oleh desa. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran yang semakin meningkat mendorong setiap entitas publik untuk terus berbenah, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Transformasi digital yang tengah berlangsung di berbagai sektor turut mendorong profesi akuntansi publik untuk beradaptasi, khususnya dalam pengembangan kompetensi berbasis teknologi informasi guna menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks Aprina, dkk (2025). Oleh karena itu, isu akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi perbincangan hangat baik di forum akademis maupun dalam praktik pemerintahan sehari-hari, yang menegaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik masih menjadi isu sentral dan relevan hingga saat ini.

Meskipun kerangka regulasi akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami berbagai penyempurnaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Matondang, dkk. (2025) dalam kajiannya tentang penerapan akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah menemukan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi publik sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas sistem informasi keuangan yang digunakan. Penguatan tata kelola melalui sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi, mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan publik yang semakin tinggi di era desentralisasi dan otonomi daerah. Tantangan ini tidak hanya dirasakan pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga merambah hingga ke entitas ekonomi paling dasar di tingkat desa, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen ekonomi desa yang mengelola potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak agar tujuan pendiriannya dapat tercapai secara optimal. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Sebagai institusi publik dalam skala mikro, BUMDes memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dalam pengelolaan unit-unit usahanya.

Prinsip transparansi menuntut BUMDes untuk membuka akses informasi kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah atas pengelolaan dana dan aset yang diamanatkan. Kania (2020) mengidentifikasi bahwa lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan absennya sistem pelaporan yang terstruktur merupakan faktor-faktor dominan yang menyebabkan buruknya kinerja BUMDes di berbagai daerah. Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan sistem akuntansi yang memadai sebagai tulang punggung pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan. Berdasarkan data terkini dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) per Maret 2026, Indonesia memiliki 72.807 BUMDes, yang terdiri dari 66.332 BUMDes dan 6.475 BUMDes Bersama. Jumlah ini menunjukkan bahwa BUMDes telah menjadi tulang punggung perekonomian desa di seluruh nusantara.

BUMDes Megamendung Jaya berlokasi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah kawasan wisata Puncak dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi sepanjang tahun. BUMDes ini didirikan dengan tujuan mengelola potensi desa secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pengurus BUMDes Megamendung Jaya, ditemukan bahwa kondisi pengelolaan kas yang berjalan saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Praktik manajemen kas yang berjalan saat ini masih

didominasi oleh sistem pencatatan manual yang belum terstruktur dan tidak terintegrasi antar unit usaha. Kondisi ini menyimpan berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BUMDes Megamendung Jaya. Risiko utama adalah potensi kesalahan input data (*human error*) yang cukup tinggi, mengingat proses pencatatan dilakukan secara berulang dengan volume transaksi yang terus meningkat. Lalu, kerentanan terhadap kehilangan data fisik akibat bencana atau kelalaian manusia dalam penyimpanan dokumen. Kondisi ini sejalan dengan temuan Prawoto, dkk (2023) yang menyebutkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi melalui pendampingan teknis dan digitalisasi sistem.

Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kas tersebut berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BUMDes Megamendung Jaya. Laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak tepat waktu mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Maharani (2026) mengemukakan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam akuntansi keuangan di sektor publik Indonesia adalah menjembatani kesenjangan antara teori yang telah berkembang pesat dan praktik di lapangan yang kerap masih jauh dari ideal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang diinvestasikan di BUMDes. Bahkan, ketidakmampuan menyajikan laporan yang berkualitas berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan yang tidak terdeteksi akibat

lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karenanya, pembenahan sistem informasi keuangan BUMDes merupakan langkah mendesak yang harus segera diambil, dan berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa transformasi digital adalah jawaban yang paling tepat atas permasalahan ini.

Sejumlah penelitian terdahulu secara konsisten membuktikan efektivitas penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Putri, dkk (2024) menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan BUMDes. Turrahmi, dkk (2023) menemukan bahwa digitalisasi sistem informasi BUMDes mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data transaksi dan pelaporan keuangan dalam satu platform terpusat. Lebih lanjut, Karma, dkk (2024) membuktikan bahwa integrasi sistem pelaporan keuangan antar unit usaha mampu mempercepat proses konsolidasi laporan dan meningkatkan akurasi informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Fudiantoro, dkk (2024) secara khusus menegaskan bahwa sistem informasi BUMDes berbasis web terbukti sangat efektif dan efisien untuk pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan usaha. Temuan-temuan ini secara kolektif mengonfirmasi bahwa transformasi digital dalam tata kelola BUMDes bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang mendesak

Berdasarkan analisis kebutuhan awal yang dilakukan di BUMDes Megamendung Jaya melalui wawancara, teridentifikasi dua kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan unit usaha. Kebutuhan pertama yang teridentifikasi adalah peningkatan efisiensi waktu kerja dan akurasi pencatatan. Lalu, Kebutuhan kedua yang muncul dari analisis adalah perlunya media yang dapat menyajikan informasi kinerja unit usaha secara transparan kepada masyarakat. Sebagai entitas publik, BUMDes memiliki kewajiban moral untuk membuka akses informasi mengenai pengelolaan usaha kepada masyarakat desa selaku pemilik modal. Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Megamendung Jaya merupakan prinsip fundamental yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan serius. Akuntabilitas, dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah bentuk pertanggungjawaban pengurus BUMDes kepada masyarakat desa selaku pemilik modal atas seluruh aktivitas pengelolaan usaha dan keuangan yang telah diamanatkan. Prinsip ini membagi akuntabilitas menjadi dua dimensi krusial: akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa dan aparat pengawas; serta akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat luas yang berhak mengetahui dan mengawasi pengelolaan dana desa .

Kondisi faktual di BUMDes Megamendung Jaya menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan saat ini masih sangat terbatas pada forum musyawarah desa yang diselenggarakan secara periodik. Praktik ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas horizontal, dimana masyarakat hanya

memperoleh kesempatan terbatas untuk mengakses informasi kinerja BUMDes dan memberikan aspirasinya . Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas yang efektif mensyaratkan adanya akses informasi yang mudah, lengkap, dan tersedia setiap saat, bukan hanya pada forum-forum formal yang terbatas waktunya . Minimnya akses ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu konflik sosial dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program BUMDes . Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan laporan keuangan seringkali tidak dapat disusun tepat waktu dan kurang akurat, sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban kepada publik . Padahal, akuntabilitas yang baik merupakan fondasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kekuasaan pengelolaan dana desa diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tingkat integritas dan efisiensi yang tinggi .

Namun, selama ini mekanisme penyampaian informasi masih terbatas pada forum musyawarah desa yang diselenggarakan secara periodik. Merujuk pada dua kebutuhan yang telah teridentifikasi, pengembangan website sistem manajemen unit usaha menjadi solusi yang paling relevan dan strategis. Website dipilih sebagai platform karena memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas, dan skalabilitas. Dengan sistem berbasis web, data dapat dikelola secara real-time dari berbagai lokasi, resiko kehilangan dokumen fisik dapat ditekan hingga minimal, dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Produk ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen akuntansi sektor publik yang memperkuat tata kelola BUMDes Megamendung Jaya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengembangan *website* ini sejalan dengan berbagai temuan riset sebelumnya yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web di BUMDes terbukti efektif dan efisien untuk mengelola, memonitor, dan mengawasi aktivitas bisnis Fidianoro, dkk (2024), sekaligus menyediakan layanan informasi kepada publik secara transparan sebagai perwujudan nyata prinsip akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes yang berkelanjutan.

B. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dan paling fundamental dalam pendekatan *Research and Development (R&D)*. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan, serta merumuskan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh produk yang akan dikembangkan. Dalam konteks penelitian pengembangan *website* sistem manajemen unit usaha pada BUMDES Megamendung Jaya, analisis kebutuhan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam dengan Direktur BUMDes Megamendung Jaya. Hasil dari analisis kebutuhan

ini akan menjadi fondasi dalam merancang spesifikasi produk yang tepat guna dan sesuai dengan karakteristik BUMDes Megamendung Jaya.

C. Tujuan Proyek

Tujuan proyek merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian pengembangan. Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan proyek penelitian ini secara sistematis dan terukur. Tujuan utama adalah menjamin ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan melalui otomatisasi dan validasi sistem. Lalu, Membuka akses informasi kinerja BUMDes kepada publik sebagai wujud akuntabilitas, Dan tujuan yang terakhir adalah mengimplementasikan sistem dengan mekanisme validasi otomatis yang mampu mendeteksi dan mencegah kesalahan input data.